

PERANCANGAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH JAWA BARAT DI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN MENGGUNAKAN TOGAF

Amira Jauharah Diffa*1, Asti Amalia2, Ridha Hanafi3)

- 1. Universitas Telkom, Indonesia
- 2. Universitas Telkom, Indonesia
- 3. Universitas Telkom, Indonesia

Article Info

Kata Kunci: Enterprise Architecture; BAPENDA; Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; SPBE; TOGAF ADM

Keywords: Enterprise Architecture; BAPENDA; Revenue Planning and Development Department; SPBE; TOGAF ADM

Article history:

Received 17 February 2024 Revised 2 March 2024 Accepted 16 March 2024 Available online 1 June 2024

DOI:

https://doi.org/10.29100/jipi.v9i2.4492

* Corresponding author. Amira Jauharah Diffa E-mail address: amirajauhara@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. TIK dapat digunakan untuk mendorong efektifitas sistem pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah guna memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diistilahkan sebagai e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis lektronik (SPBE). Salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk SPBE adalah Provinsi Jawa Barat pada organisasi perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. BAPENDA Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lain sebagaimana ketentuan peraturang undang-undang. Melalui BAPENDA ini dapat membantu Provinsi Jawa Barat dalam memanfatkan teknologi informasi dalam bentuk SPBE serta berkontribusi dalam menaikan nilai indeks SPBE. BAPENDA Provinsi Jawa Barat sendiri terdiri dari beberapa bidang yang membantu pelayanan pada BAPENDA, salah satunya Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Maka sebab itu, penelitian ini berfokus pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini bertujuan guna menjalankan perancangan arsitektur Enterprise menggunakan framework TOGAF ADM sebagaimana Surat Edaran Menteri PAN & RB No.18 Tahun 2022 terkait penyusunan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup instansi pemerintahan daerah sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup instansi pemerintahan daerah. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan metode kualitatif deskriptif, dimana perancangan arsitektur Enterprise ini akan menghasilkan blueprint Enterprise Architecture (EA) yang akan menjadi solusi dan panduan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan melakukan pengembangan sistem informasi serta dihasilkan IT Roadmap yang akan menjadi panduan prioritas dalam melakukan project pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

ABSTRACT

Information and Communication Technology (ICT) plays a significant role in society. This technology can be utilized to improve the effectiveness of the government system in enhancing public services. One of the government's efforts to leverage information and communication technology is known as e-government or Electronic-Based Government System (SPBE). One region in Indonesia that implements the use of information technology in the form of SPBE is West Java Province, specifically in the regional organization called the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of West Java Province. BAPENDA West Java Province is responsible for managing local tax revenue and other related tasks based on regulations and laws. Through BAPENDA, West Java Province can benefit from the use of information technology in the form of SPBE and contribute to raising the SPBE index value. BAPENDA West Java Province consists of several departments that support services, including the Revenue Planning

JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Journal homepage: https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jipi ISSN: 2540-8984

Vol. 9, No. 2, Juni 2024, Pp. 615-627



and Development Department. Therefore, this research focuses on the Revenue Planning and Development Department at BAPENDA West Java Province. This study aims to design an Enterprise architecture using the TOGAF ADM framework, in accordance with the Circular Letter from the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 18 of 2022 on the preparation of SPBE architecture and SPBE plan mapping as the foundation for implementing SPBE within local government agencies. Descriptive qualitative method are implemented in this research, where the Enterprise architecture design will result in an Enterprise Architecture (EA) blueprint, which will serve as a solution and guide for the Revenue Planning and Development Department in developing information systems. Additionally, an IT Roadmap will be produced, providing a priority guide for projects within the Revenue Planning and Development Department of BAPENDA West Java Province.

I. PENDAHULUAN

EKNOLOGI informasi dan komunikasi (TIK) mempunyai peranan krusial dalam kehidupan masyarakat dimana teknologi informasi dan komunikasi ini digunakan untuk meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan guna meningktnya pelayanan publik. Salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan dan meningkatkan TIK diistilahkan sebagai *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) [1]. SPBE merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan pemerintah guna membrikan layanan bagi para penggunanya. Adanya SPBE *E-government* ini diharapkan dapat membuat proses birokrasi menjadi lebih produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi [2].

Adapun Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna menguatkan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam PerMen PAN & RB No. 5 Tahun 2018 mengenai pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dimana dalam hal ini diperlukan guna menjalankan evaluasi yang maksimal. Pada penggunaan SPBE ini dimaksudkan agar seluruh pemerintah daerah dan pusat dapat berbondong-bondong dalam mencapai tujuan *egovernment* di Indonesia ini [3].

Dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini diperlukan patokan nilai dalam melakukan pengukuran kematangan pada pelaksanaanya di Instansi pusat dan Pemerintah daerah. Menurut dokumen PerMen PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020 bahwa adanya predikat penilaian SPBE dimana nilai ini memproyeksikan taraf kematangan implementasi SPBE sebagaimana predikat yang telah ditetapkan. Sesuai dengan dokumen tersebut penilaian indeks SPBE ini terbagi dalam beberapa kelompok dengan penilaian skala satu sampai lima, dimana skala satu dengan nilai 4,2 – 5,0 mendapatkan predikat memuaskan dan skala lima dengan nilai <1,8 mendaptakan predikat kurang [4].

Provinsi Jawa Barat menjadi satu dari sekian wilayah di Indonesia yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sesuai yang didapatkan pada laporan kajian evaluasi implementasi dan strategi optimalisasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2022 sekarang ini didapatkan bahwa Provinsi Jawa Barat menunjukan indeks SPBE 3,28 dimana dengan indeks itu menunjukan predikat "Baik". Beberapa upaya dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memacu peningkatan nilai indeks SPBE, salah satunya dengan menerapkan SPBE pada organisasi perangkat daerah. Salah satu organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang menerapkan SPBE adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

BAPENDA Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu OPD yang memiliki peran penting terhadap meningkatnya nilai SPBE. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab menjadi penyelenggara pada fungsi penunjang bidang keuangan dan membantu tugas Kepala Badan dimana kedudukannya dibawahi dan mengemban tanggung jawab terhadap Walikota melalui Sekretaris Daerah [5]. Guna meningkatkan indeks predikat SPBE tersebut BAPENDA mempunyai dua indikator keberhasilan yaitu optimalisasinya pengelolaan pendapatan daerah dan optimalisasinya pelayanan publik. Dari dua indikator tersebut dibantu dengan penyusunan peta proses bisnis yang harus terintegrasi dengan layanan serta bidang yang terdapat pada BAPENDA untuk mendukung predikat indeks SPBE tersebut mencapai targetnya.

Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat mempunyai empat bidang yang diantaranya yakni Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendapatan, serta Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan. Penelitian ini difokuskan hanya pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang memiliki empat sub kegiatan yaitu perencanan dan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah, penyusunan dokumen



perencanaan perangkat daerah, pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Setiap sub kegiatan tersebut belum mencapai target seratus persen sesuai yang di targetkan oleh BAPENDA dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Oleh karena itu, dengan adanya inovasi perbaikan atau pembaharuan pada pelayanan tiap sub kegiatan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan maka dapat membantu bidang tersebut dalam mencapai target realisasinya. Dengan tercapainya target realisasi tersebut maka akan membantu BAPENDA dalam mencapai target nilai indeks SPBE yang diinginkan yaitu predikat sangat baik.

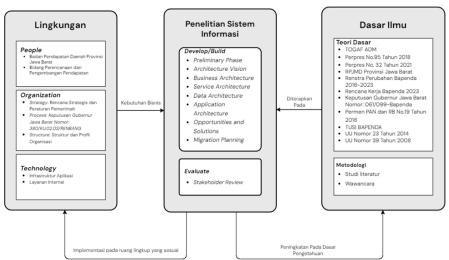
Solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan penerapan SPBE tersebut, yaitu membuat perancangan *Enterprise Architecture* yang dapat mendefinisikan arsitektur data, arsitektur bisnis, arsitektur layanan dan arsitektur aplikasi yang mampu menghasilkan pemetaan peta proses bisnis, keterkaitan layanan serta bidang pada BAPENDA, dan integrasi antar aplikasi serta dilakukan juga peracangan *Enterprise Architecture* hingga membuat rancangan kerja guna menjadi acuan strategi BAPENDA yang digunakan untuk pengembangan dan pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan yang efisiensi dan efektivitas pada BAPENDA.

Oleh karenanya, penelitian ini akan berfokus terhadap perancangan *Enterprise Architecture* dengan menerapkan kerangka kerja TOGAF ADM pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA, pada tabel nilai indeks SPBE BAPENDA Provinsi Jawa Barat domain dua aspek dua 'Tata kelola SPBE aspek Perencanaan Strategis SPBE' dan domain empat aspek delapan 'Layanan SPBE aspek layanan publik berbasis elektronik'.

II. METODE PENELITIAN

A. Model Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan metode konseptual dalam melakukan pemetaan persoalan pada perancangan *Architecture Enterprise* di Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Model Konseptual merupakan suatu penggambaran prosedur yang tersusun sistematis guna memudahkan perwujudan pemahaman dalam suatu proses yang saling terintegrasi agar tercapainya tujuan yang diinginkan [6]. Gambar 1 berikut menampilkan model konseptual untuk penelitian ini.



Gambar. 1. Model Konseptual

B. Metode Pengumpulan Data

Guna menjalankan persiapan penelitian ini digunakan sejumlah metode pengumpulan data guna memudahkan peneliti saat menelaah kajian masalah serta fokus inti pada objek organisasi saat ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini didapatkan dari pengelolaan data yang bersifat deskriptif, tujuan dari pengelolaan data deskriptif ini adalah untuk menjelasakan penelitian yang dilakukan tanpa adanya manipulasi data variable yang diteliti dengan melakukan wawancara secara langsung [7]. Pada metode penelitian ini terdapat pengumpulan data pada yang bersumber dari data sekunder dan data primer. Data primer yang dirujuk berasal dari observasi dan hasil wawancara yang peneliti langsungkan terhadap *stakeholder* Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Adapun Data sekunder dirujuk dari hasil kumpulan literasi jurnal penelitian, publikasi penelitian yang sesuai dengan topik yang dibahas, penelitian terdahulu tentang SPBE dan *Enterprise Architecture*, serta dokumen organisasi seperti rencana strategis ataupun profil organisasi yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam Tabel I dimuat data yang dirujuk pada penelitian ini.





TABEL I PENGUMPULAN DATA

Jenis Data	Sumber Data	Penggunaan Data
Primer	Hasil wawancara langsung dengan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.	Untuk validasi mengenai data proses bisnis yang telah dikumpulkan dan disediakan.
	Hasil observasi mengenai keadaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.	Untuk memahami keadaan eksisting Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat dan mencari celah untuk diberikan rekomendasi atau usulan dalam rangka meningkatkan nilai indeks SPBE.
Sekunder	Rencana Strategis Perubahan (Renstra) BAPENDA 2018 - 2023	Sebagai acuan dalam melakukan perancangan arsitektur SPBE mengenai kon- disi BAPENDA saat ini termasuk visi, misi, tujuan dan rencana pembangunan.
	Peraturan Presiden No. 95 Ta- hun 2018 Permen PAN dan RB No.19	Sebagai dasar dalam melakukan rancangan arsitektur SPBE.
	Tahun 2018	Untuk panduan dalam melakukan pemetaan proses bisnis yang ada di BAPENDA Provinsi Jawa Barat.
	UU Nomor 39 Tahun 2008	Reformasi birokrasi.
	Perpres Nomor 32 Tahun 2021 Rencana Kerja Tahun 2023 Surat Edaran Menteri PANRB No.18 Tahun 2022 TUSI BAPENDA	Pembentukan kabinet kementrian. Pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan. Pedoman Implementasi SPBE untuk dijadikan pedoman SPBE. Sebagai panduan dalam merancang proses
	Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 380/KU.02.03/RENBANG UU Nomor 23 Tahun 2014	bisnis yang ada di BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Untuk memahami mengenai proses bisnis yang dilaksanakan di BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pemerintah daerah yang didasari oleh undang-undang tersebut.

C. Pengelolaan Data dan Pengembangan Artefak

Seusai melakukan pengumpulan data maka akan dijalankan pengelolaan data serta artefak yang akan dilakukan pengembangan sebagaimana kerangka riset yang dipaparkan. Berikut merupakan rincian dari proses pengelolaan data pada penelitian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat:

1. Tahap Inisiasi

Tahap awal dari pengelolaan data disebut tahap inisiasi. Pada tahapan ini dimulai dengan melakukan survei objek penelitian agar dapat memilih serta menentukan Batasan penelitian yang dilakukan. Pada identifikasi permasalahan peneliti akan mengumpulkan dan melakukan studi liteartur serta wawancara pada objek terkait dan selanjutnya akan dilakukan penentuan rumusan masalah atas hasil identifikasi masalah terkait.

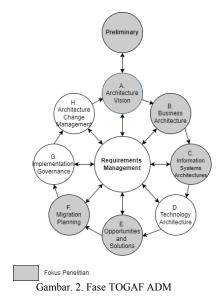
2. Tahap Identifikasi

Tahap kedua setelah tahap inisiasi adalah tahap identifikasi yang tujuannya guna menggambarkan metode pada pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan perancangan *Enterprise Architecture* SPBE pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Pada tahap ini peneliti akan mengidentifikasi konsep perancangan *Enterprise Architecture* SPBE yang telah dibuat lalu akan dilakukan sosialisasi guna menyampaikan konsep perancangan kepada *stakeholder* terkait agar dapat menyamakan persepsi pada perancangan yang telah dibuat sehingga peneliti dapat meneruskan ke tahap perancangan konsep yang telah disepakati bersama.

3. Tahap analisis dan perancangan

Tahap ketiga adalah tahap analisis dan perancangan yang tujuanya untuk merancang *Enterprise Architecture* SPBE pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan yang sesuai dengan Permen PAN & RB No.19 Tahun 2018 dan kerangka kerja TOGAF ADM yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Pada tahap ini akan dilakukan pengidentifikasian arsitektur yang menghasilkan *output* berupa artefak serta analisis kesenjangan antara kondisi *existing* dan *targeting* arsitektur. Artefak yang dihasilkan berasal dari fase yang terdapat pada TOGAF ADM, dimana TOGAF ADM ini memuat delapan fase utama serta fase *preliminary*. Berikut Gambar 2 memuat fase pada TOGAF ADM





Fase TOGAF pada penelitian ini disesuaikan dengan arsitektur SPBE pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Berikut merupakan sejumlah tahapan dari TOGAF ADM yang diimplementasikan pada studi ini:

- 1. *Prelimenary Phase* (Fase Awal), mendefinisikan aktivitas persiapan dan inisiasi guna merancang sebuah *Architecture Capability* mencakup penyesuaian kerangka kerja pada TOGAF dan *Architecture Principle*.
- 2. Architecture Vision (Arsitektur Visi), mendefinisikan fase awal pada sebuah siklus pengembangan arsitektur yang mencangkup pengembangan arsitektur, mengidentifikasi stakeholder, identifikasi Architecture Vision, serta mendapatkan persetujuan guna meneruskan pengembangan arsitektur.
- 3. Business Architecture (Arsitektur Bisnis), mendefinisikan pengembangan arsitektur bisnis guna menunjang Architecture Vision yang telah disepakati.
- 4. *Service Architecture* (Arsitektur Layanan), mendefinisikan layanan SPBE yang orientasinya pada proses bisnis dan aplikasi melalui sistem informasi yang terintegrasi.
- 5. Data and Information Architecture (Arsitektur Data dan Informasi), mendefinisikan entitas data pada setiap aplikasi yang digunakan guna mencetak blueprint Enterprise Architecture.
- 6. *Application Architecture*, mendefinisikan aplikasi serta jenis aplikasi yang digunakan guna melakukan pengelolaan data serta menunjang aktivitas bisnis organisasi.
- 7. *Opportunities and Solution*, mendefinisikan perencanaan implementasi awal serta pengidentifikasian sarana bagi arsitektur yang telah ditentukan dalam fase sebelumnya.
- 8. *Migration Planning*, mendefinisikan cara organisasi dalam menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi yang direncanakan.

Sesuai penjelasan di atas, maka pada penelitian ini menggunakan *framework* TOGAF dikarenakan *framework* ini mempunyai metode yang fleksibel dalam mengidentifikasikan pemodelan perancangan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi selain hal tersebut *framework* ini cocok untuk *integrated system* yang ada pada organisasi [8]. Dimana hal tersebut belum bisa dilakukan pada *framework* lain seperti *Zachman Framework* dan *Federal Enterprise Architecture Framework* (FEAF).

D. Tahap Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan tahap yang didapatkan setelah melakukan evaluasi terhadap penelitian [9]. Kesimpulan dan saran yang diberikan berupa penyelesaian masalah yang terdapat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat serta diberikanya usulan atau saran yang dapat diterapkan untuk penelitian berikutnya yang mendukung sasaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yakni merealisasikan inovasi tata Kelola pemerintahan yang bersih, *smart*, dan akuntabel. Kesimpulan dan saran yang diberikan disusun berdasarkan hasil evaluasi dengan *stakeholder* tarkait yang *output*nya berupa *blueprint Enterprise Architecture* pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

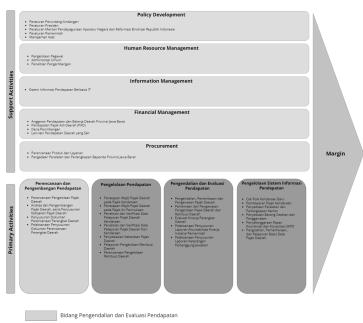
A. Preliminary Phase

Preliminary Phase menjadi tahap pertama dalam suatu proses yang didalamnya akan dilakukan persiapan, analisis awal, serta penetuan langkah berikutnya yang berfokus pada "where, what, why, who, and how to implement the architecture" [10]. Fase preliminary ini bertujuan untuk pemeroleh pemahaman yang menyeluruh pada masalah, evaluasi, mengidentifikasi risiko yang akan muncul serta merencanakan strategi yang akan diimplementasikan pada tahap berikutnya. Pada fase Preliminary ini akan dihasilkan Principles Catalog yang berisikan sejumlah prinsip yang terdapat pada organisasi guna menjalankan proses bisnis didalamnya, pada tabel ini akan memuat dua prinsip pada domain proses bisnis yang mengacu pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Di bawah ini Tabel II merupakan Principles Catalog pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

TABEL II Principle Catalog					
Domain	Prinsip	Definisi	Rasional		
Proses Bisnis	Primacy of Principle	Prinsip terkait manajemen informasi yang berlaku pada setiap aktivitas bisnis pada BAPENDA.	Cara untuk dapat memberikan kualitasi in- formasi yang konsisten dan terukur kepada para pembuat keputusan yaitu unit atau fungsi pada BAPENDA.		
	Information Manage- ment is Everybody's Business	Seluruh unit atau fungsi pada organ- isasi berpartisipasi pada pengambi- lan keputusan manajemen informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan bisnis.	Pengguna informasi pada penerapan teknologi dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Semua unit dan fungsi pada BAPENDA harus terlibat agar dapat dipastikanya manajemen informasi selaras dengan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan.		

B. Architecture Vision

Architecture Vision ialah fasel awal dalam pengembangan organisasi yang berfokus pada visi serta tujuan organisasi agar mencapai pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana arsitektur organisasi akan mencapai tujuan yang diinginkan. Output dari fase ini adalah Solution Concept Diagram serta Value Chain Diagram. Berikut adalah Gambar 3 berupa Value Chain Diagram yang memuat fungsi inti (primary activities) dan fungsi pendukung (support activities) pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.



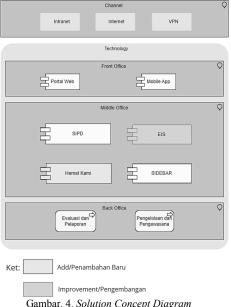
Gambar. 3. Value Chain

Pada Gambar 4 merupakan *Solution Concept Diagram* yang menjabarkan bagaimana aplikasi berkomunikasi satu sama lain, bagaimana proses penyimpanan data, keamanan pada data, keamanan sistem, serta jaringan yang digunakan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat [11]. Pada *Solution Concept Diagram* ini akan memuat empat layer penyusunan yaitu:

1. Channels, layer yang berperan sebagai penghubung pada aplikasi agar dapat pengguna dapat mengakses.



- 2. Front Office, layer yang menunjukan aplikasi yang berhadapan langsung dengan user. Pada aplikasi yang menyediakan fungsionalitas serta data yang akan digunakan oleh user dan biasanya menjadi tempat pertama untuk membuat atau memasukan data serta informasi.
- 3. Middle Office, layer yang menunjukan aplikasi yang digunakan guna menunjang fungsi bisnis atau proses bisnis. Pada Middle Office ini aplikasi digunakan untuk mengambil data dan informasi dari aplikasi lainnya untuk digunakan.
- 4. Back Office, layer yang menunjukan aplikasi yang menyediakan fungsionalitas untuk internal perusahaan.



Gambar. 4. Solution Concept Diagram

C. Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur proses bisnis terdiri beberapa aktivitas terstruktur yang menampilkan penjabaran atas arsitektur bisnis existing dan targeting yang dapat dijadikan inovasi efektif serta efisien untuk Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Output proses bisnis ini berpedoman pada (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018) terkait Penataan Peta Proses Bisnis Lembaga Pemerintah. Adapun penggambaran Peta Proses Bisnis dijalankan dengan mengidentifikasi proses inti dan pendukung yang ada di organisasi, selanjutnya dihubungkan dengan standar proses bisnis organisasi [12]. Pada arsitektur proses bisnis ini terdapat Goal/Objective/Requirement Catalog bertujuan untuk pendefinisian tujuan dari merancang arsitektur enterprise secara keseluruhan [13], berikut Tabel III merupakan Goal/Objective/Requirement Catalog. Lalu Pada arsitektur proses bisnis ini terdapat juga artefak yang mendefinisikan layanan-layanan yang ada pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat pada fungsi bisnisnya [14]. Artefak yang dimaksud adalah Business Service/Function Catalog, artefak ini difungsikan untuk memberikan pemahaman terkait bagaimana organisasi berinteraksi dengan penggunanya. Pada Tabel IV merupakan Business Service/Function Catalog pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

Т	ABEL III
GOAL/OBJECTIVE	REQUIREMENT CATALOG



Goal	Objective	Requirement	Domain Arsitektur	Sub Requirement
	<u> </u>	•	Layanan	Layanan mencakup seluruh proses bisnis dan aplikasi yang digunakan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
			Data dan informasi	Data dapat diakses oleh seluruh fungsi terkait untuk pelaksanaan kebutuhan ak- tivitas bisnis.
		Upaya pelayanan samsat <i>online</i> berbasis web dan android/ios untuk wilayah perkotaan dan pelayanan samsat <i>mobile</i> dan <i>channeling</i> untuk wilayah pedesaan.	Proses bisnis	Proses bisnis yang ada harus menyediakan layanan yang memberi kemudahan dalam pengaksesan, luas serta agar dapat memudahkan BAPENDA dan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam penyebaran informasinya.
			Layanan	Inovasi pada layanan yang selalu diberi- kan agar berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
			Aplikasi	Aplikasi yang digunakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penda- patan mengikuti perubahan standar teknologi yang digunakan.
			Proses bisnis	Proses bisnis memiliki aplikasi dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.
		Upaya pengelolaan data dan <i>analysis-insight</i> pajak daerah dengan pendapatan berbasis platform dan <i>artificial intelligent</i> .	Layanan	Layanan yang melibatkan dan diawasi oleh unit dan fungsi BAPENDA.
			Data dan informasi	Data dan Informasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Provinsi Jawa Barat memiliki aset penting dan dikelola dengan baik.
			Data dan informasi	Data dan Informasi memiliki kontrol hak akses agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
			Data dan informasi	Data dan Informasi yang konsisten agar terhindar dari ambiguitas dan dapat dipahami.
	Optimalisasi kualitas pe- layanan pub- lik	Upaya mendekatkan komunikasi antara pemerintah dengan wajib pajak dalam bentuk pelayanan konsultasi pajak, pengaduan, penelusuran dan publikasi pajak berbasis teknologi komunikasi	Layanan	Layanan yang akurat, akuntabel serta mudah digunakan oleh pengguna terkait.
			Aplikasi	Aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna guna memudahkan aktivitas bisnis organisasi.
			Proses bisnis	Operasional proses bisnis yang ada pada BAPENDA di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan harus dapat menggunakan aplikasi yang ada pada Bapenda tersebut ataupun aplikasi dari pemerintah pusat.
			Data dan informasi	Validitas atas data dapat dipertanggung jawabkan.
		Upaya kolaborasi provinsi jabar dengan pusat, kab/kota dan stakeholder pajak daerah dalam pengelolaan data wajib pajak, sistem informasi pajak dan <i>join analysis</i> dan <i>supervise</i> .	Proses bisnis	PermenPAN RB. No. 19 Tahun 2018 digunakan untuk melakukan desain peta proses bisnis agar desain tersebut mampu memenuhi tata aturan penyusunan peta proses bisnis yang telah diatur pemerintah.
			Data dan informasi	Pengelolaan data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang diatur melalui Perpres No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

TABEL IV BUSINESS SERVICE/FUNCTION CATALOG

BUSINESS SERVICE/TUNCTION CATALOG				
Unit Kerja/Fungsi	Proses Bisnis	Layanan		
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Layanan Perencanaan Pajak Daerah		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pa- jak Daerah	Layanan pengembangan pendapatan dan penyusunan kebijakan pajak daerah		



Unit Kerja/Fungsi	Proses Bisnis		Layanan	
	Penyusunan	Dokumen	Layanan	Perencanaan
	Perencanaan	Perangkat	Perangkat Dae	erah
	Daerah			
	Pelaksanaan	Penyusunan	Layanan	penyusunan
	Dokumen Perangkat Da	Perencanaan erah	Perencanaan I	Perangkat Daerah

D. Arsitektur Layanan

Arsitektur Layanan dibuat guna mengetahui identifikasi layanan dalam suatu organisasi berdasarkan proses bisnis, data dan informasi, dan aplikasi. Layanan yang dimaksud merupakan layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), layanan SPBE digunakan dalam memacu peningkatan kualitas layanan agar dapat menjalankan pengembangan layanan SPBE yang orientasinya terhadap penggun dan berkelanjutan. Layanan ini terbagi menjadi dua kategori, yakni layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi adalah layanan yang menunjang pelaksanaan internal organisasi guna mewujudkan peningkatan kinerja serta akuntabillitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar tata laksana internal birokrasi dapat berjalan. Sementara, layanan publik ialah layanan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan publik dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka sebab itu, dalam penelitian ini berfokus pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

Pada arsitektur layanan terdapat *catalog* layanan yang merupakan *output* dari arsitektur layanan. Katalog layanan ini diperoleh melalui hasil analisis serta identifikasi aplikasi yang ada pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat [15]. Katalog layanan memuat pemetaan layanan administrasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Katalog layanan pada arsitektur layanan memuat aplikasi pendukung dan penyedia layanan pada layanan tersebut. Berikut Tabel V merupakan katalog layanan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.

TABEL V KATALOG LAYANAN

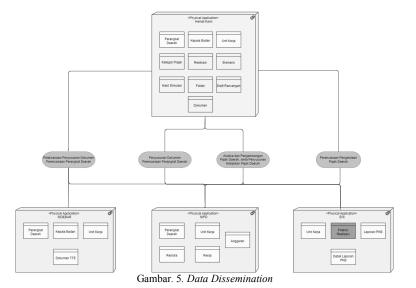
KATALOG LATAWAN			
Layanan Pemenrintah Provinsi	Layanan Bidang Perencananaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda	Aplikasi Pendukung	Penyedia Layanan
Layanan Pendapatan	Layanan Perencanaan Pajak Daerah	1. Hemat Kami 2. SIPD 3. EIS	Bidang Perencanaan dan Pengembang Pendapatan
	Layanan pengembangan pendapatan dan penyusunan kebijakan pajak daerah Layanan perencanaan Perangkat Dae- rah Layanan penyusunan perencananan perangkat daerah	1. SIPD 2. EIS 3. Hemat Kami 1. SIPD 2.Hemat Kami 1. SIPD 2.Hemat Kami 3. SIDEBAR	

E. Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur Data dan Informasi berupa kumpulan kebutuhan data guna mengembangkan aplikasi dengan mengacu pada proses bisnis yang telah disusun pada *Value Chain* [16]. Arsitektur Data dan Informasi bertujuan guna mendukung fase *Architeture Vision* dan arsitektur proses bisnis. Arsitektur data akan digunakan untuk perancanaan model data guna memenuhi kebutuhan yang diinginkan serta melakukan analisis kesenjangan. Perancangan atas model data wajib mampu menunjang integrasi data, *control asset* data serta data dan strategi organisasi terselarasakan.

Pada arsitektur data dan informasi terdapat *Data Dissemination* yang berupa *output* dari arsitektur data dan informasi. *Data Dissemination Diagram* berupa penggambaran diagram yang berperan guna melihat hubungan dari data dan kegiatan bisnis serta aplikasi yang dirancang [17]. Penggambaran diagram tersebut dilakukan guna mempemudah memperbaiki atau menyempurnakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam organisasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan *Data Dissemination Diagram* menampilkan cara entitas data logis diimplementasikan secara fisik kedalam setiap aplikasi yang digunakan dalam aktivitas bisnis Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan Gambar 2 yang memaparkan *Data Dissemination* pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.





F. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi akan menyediakan satu *blueprint* untuk aplikasi yang dibangun serta hubungan aplikasi tersebut dengan proses bisnis organisasi [18]. Arsitektur Aplikasi berlokasi dalam satu fase dengan arsitektur data, yaitu pada *Phase* C: *Information System Architecture*. Oleh karena itu, perancangan Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Data memberikan dukungan antara satu dengan yang lainnya. Pada arsitektur aplikasi ini harus diidentifikasikan sesuai dengan proses bisnis pada organisasi [19].

Pada arsitektur aplikasi terdapat katalog aplikasi yang merupakan *output* dari arsitektur aplikasi. Katalog Aplikasi memuat keseluruhan aplikasi yang dijalankan dalam Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat dalam melangsungkan aktivitas bisnis baik aplikasi *existing* maupun aplikasi *targeting*. Berikut Tabel VI adalah Katalog Aplikasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

TABEL VI KATALOG APLIKASI

KATALOG APLIKASI					
Nama Aplikasi	Deskripsi Aplikasi	Penyedia Aplikasi	Unit Kerja Terkait		
Sistem Informasi Pemerintah Dae- rah (SIPD)	Sistem Informasi terintergrasi dengan pemerintahan pusat yang didalamnya terdapat tiga modul system informasi yaitu Sistem Informasi Pengembangan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, serta Sistem Informasi Pemerintah Lainnya.	Kementrian dalam Negeri (Kemendagri RI)	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendaptan, Bidang Evaluasi dan Monitoring		
Executive Information System (EIS)	Sistem Informasi untuk dashboard alert serta berfungsi juga untuk monitoring pendapatan secara <i>real time</i> .	BAPENDA Provinsi Jawa Barat	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Pengelolaan Pendaptan, Bidang Evaluasi dan Monitoring.		
Hemat Kami	Aplikasi yang berguna untuk menghitung proyeksi pendapatan serta mengetahui analisis skenario dengan melakukan simulasi dengan periode yang ditentukan sehingga akan mengetahui analisis skenario yang didapatkan dari hasil perhitungan tersebut serta aplikasi yang berguna untuk pengarsipan dokumen serta pengesahan dokumen pada BAPENDA.	BAPENDA Provinsi Jawa Barat	Bidang Evaluasi dan Monitoring. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan		
SIDEBAR	SIDEBAR atau yang disebut Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat merupakan salah satu aplikasi E-Office berbasis mobile yang ber- fungsi untuk proses surat menyurat yang digunakan oleh ASN Provinsi Jawa Barat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Kepala Badan		

G. Blueprint Enterprise Architecture

Blueprint Enterprise Architecture merupakan cetak biru berupa kumpulan solusi yang diberikan dalam penelitian. Melalui Blueprint ini para pemangku kepentingan akan mampu melakukan perencanaan secara baik



akan sistem informasi yang akan turut menunjang proses bisnis yang berajalan pada organisasi [20]. Blueprint Enterprise Architecture bertujuan untuk menjadi panduan dalam perubahan arsitektur proses bisnis hingga arsitektur aplikasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Berikut dalam Tabel VII Blueprint pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat.

> TABEL VII BLUEPRINT

BLUEPRINT ENTERPRISE ARCHITECTURE BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

RUANG LINGKUP

BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN

DOKUMEN ARAHAN DASAR

- Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eleketronik
- PermenPAN RB No.19 Tahun 2018.
- UU Nomor 23 Tahun 2014.
- UU Nomor 39 Tahun 2008.
- Peraturan Presiden No.32 Tahun 2021.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor: 380/Ku.02.03/Renbang.
- Surat Edaran Menteri PAN & RB No.18 Tahun 2022.

DOMAIN ARSITEKTUR PROSES BISNIS

- Redesign Proses Bisnis Level 3 mengenai perencanaan pengelolaan pajak daerah.
- Redesign Proses Bisnis Level 3 mengenai analisa dan pengem-bangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah.
- Redesign Proses Bisnis Level 3 mengenai penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- Redesign Proses Bisnis Level 3 mengenai pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

DOMAIN ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

- Pemetaan entitas data pada aplikasi SIPD yaitu perangkat daerah, unit kerja, renstra, renja, anggaran.
- Pemetaan entitas data pada aplikasi EIS yaitu perangkat daerah, laporan PKB, detail laporan PKB, potensi realisasi.
- Pemetaan entitas data pada aplikasi Hemat Kami vaitu perangkat daerah, unit kerja, kepala bdan, scenario, hasil simulasi, realisasi, kategori pajak, folder, doku-
- Pemetaan entitas data pada aplikasi SIDEBAR yaitu perangkat daerah, unit kerja, kepala badan, dokumen
- Melakukan integrasi data potensi realisasi dengan aplikasi EIS dengan aplikasi Hemat Kami untuk data pendapatan.

ARAHAN STRATEGI ORGANISASI

Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.

Misi:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan, serta kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

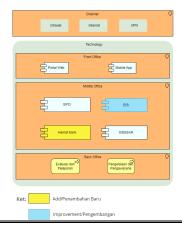
DOMAIN ARSITEKTUR LAYANAN

- Perancangan layanan perencanaan pajak daerah.
- Perancangan layanan pengembangan pendapatan dan penyusunan kebijakan pajak daerah.
- Perancangan layanan perencanaan perangkat daerah.
- Perancangan layanan penyusunan perencanaan perangkat daerah.

DOMAIN ARSITEKTUR APLIKASI

- Pembuatan aplikasi Hemat Kami dalam membantu melakukan perhitungan proyeksi pendapatan, pengesahan dan verifikasi hasil proyeksi serta verifikasi dokumen perancangan dan tempat penyimpanan dokumen terkait Bidang Perencanaan dan Pengem-
- Pengembangan aplikasi EIS untuk melakukan integrasi data pendapatan dengan aplikasi Hemat Kami untuk melakukan perhitungan proyeksi pendapatan dengan penambahan API.

SOLUTION CONCEPT DIAGRAM





Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa perancangan arsitektur *enterprise* pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Perancangan arsitektur *enterprise* merupakan inovasi yang akan membantu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan BAPENDA Provinsi Jawa Barat dalam mencapai target realisasi seratus persen sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Provinsi Jawa Barat. Inovasi yang diberikan dalam perancangan arsitektur *enterprise* ini berupa *Blueprint* yang akan dijadikan pedoman akan solusi yang dibuat oleh peneliti untuk Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Selain itu, Blueprint EA ini akan mendukung proses bisnis yang terinformasi pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan [21].

IV. KESIMPULAN

Temuan penelitian pada perancangan *Enterprise Architecture* BAPENDA Provinsi Jawa Barat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan menggunakan TOGAF yang bertujuan untuk meningkatkan nilai SPBE domain tata kelola aspek perencanaan strategis SPBE dan domain layanan SPBE aspek layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mana dari dua aspek tersebut dapat membantu Provinsi Jawa Barat menaikan nilai SPBE nya. Pada perancangan *Enterprise Architecture* yang dilakukan sejak fase *Preliminary* hingga fase *Application Architecture* maka didapatkan *output* yaitu *blueprint Enterprise Architecture* yang akan dijadikan panduan solusi dalam perubahan serta IT *Roadmap* yang menjadi panduan dalam menentukan lama proyek yang akan dikembangkan. Dimana kedua output tersebut dapat membantu BAPENDA Provinsi Jawa Barat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mencapai tujuanya.

V. SARAN

Penelitian ini memebrikan *output* berupa *Blueprint* dan IT *Roadmap* yang dijadikan panduan untuk mengembangkan sistem pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan. Penelitian selanjutnya dianjurkan untuk sampai hingga Phase G: *Implementation Governance* dan Phase H: *Architecture Change Management* guna mampu menciptakan rancangan secara kian komprehensi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Arief and M. Y. Abbas, "Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," 2021.
- [2] H. D. Pratiwi, W. Hayuhardhika, N. Putra, and A. D. Herlambang, "Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," 2020. [Online]. Available: http://j-ntijk.ub.ac.id
- [3] A. Widiyarta, C. Eka Windiastuti, and H. Izaz Robbani, "EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA," 2020.
- [4] A. Widia, D. Putri, L. Abdurrahman, and R. A. Nugraha, "EVALUATION OF THE ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM USING THE REGULATION OF THE MINISTER OF PAN-RB NUMBER 59 OF 2020 CONCERNING MONITORING AND EVALUATION OF SPBE ON THE SERVICE DOMAIN IN DISKOMINFO CITY OF BANDUNG," vol. 8, no. 5, 2021.
- [5] J. Fernos and I. Wipi, "PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG", doi: 10.46306/vls.v3i2.
- [6] Rony Sandra Yofa Zebua, *Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Daring (Model Konseptual)*. 2021.
- [7] S. Hanyfah, G. Ryan Fernandes, I. Budiarso, and J. RayaiTengah Nomor, "PENERAPAN METODE KUALITATIF DESKRIPTIF UNTUK APLIKASI PENGOLAHAN DATA PELANGGAN PADA CAR WASH," 2022.
- [8] R. Prasetya, V. H. Valentino, and R. Prasetya, "TATA KELOLA APLIKASI DIGITAL DENGAN PENYEDERHANAAN TOGAF ADM FRAMEWORK PADA PT SUCOFINDO," Jurnal Manajemen Informatika & Sistem Informasi (MISI), vol. 6, no. 1, 2023, doi: 10.36595/misi.v5i2.
- [9] N. Karolina, "Data Mining Pengelompokan Pasien Rawat Inap Peserta BPJS Menggunakan Metode Clustering (Studi Kasus: RSU.Bangkatan)." [Online]. Available: www.kaputama.ac.id
- [10] The Open Group, TOGAF ADM. 2009.
- [11] L. Sofyana and A. R. Putera, "Business architecture planning with TOGAF framework," in *Journal of Physics: Conference Series*, Institute of Physics Publishing, Nov. 2019. doi: 10.1088/1742-6596/1375/1/012056.
- [12] K. R. Dinar, A. A. N. Fajrillah, and R. Hanafi, "PENYUSUNAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA BIDANG PERINDUSTRIAN DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PEREKONOMIAN JAWA BARAT MENGGUNAKAN METODE TOGAF ADM 9.2,"

 **JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 8, no. 1, pp. 218–229, Feb. 2023, doi: 10.29100/jipi.v8i1.3267.
- [13] A. P. Nugraha and A. Wicaksono, "PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA SISTEM INFORMASI PERUSAHAAN TOUR DAN TRAVEL MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM (STUDI KASUS : CV. JAYA NIAGA TRANSINDO)."
- [14] M. I. Alhari, A. Amalia, and N. Fajrillah, "INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION journal homepage: www.joiv.org/index.php/joiv INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION Enterprise Architecture: A Strategy to Achieve e-Government Dimension of Smart Village Using TOGAF ADM 9.2." [Online]. Available: www.joiv.org/index.php/joiv
- [15] A. S. Qotrunnisa, S. F. S Gumilang, and R. A. Nugraha, "MODEL ARSITEKTUR LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH DAERAH KUNINGAN," *Jurnal Informatika dan Komputer) Akreditasi KEMENRISTEKDIKTI*, vol. 4, no. 3, 2021, doi: 10.33387/jiko.
- [16] R. Fitriana and M. Bakri, "PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN THE OPEN GROUP ARSITEKTURE FRAMEWORK (TOGAF)," 2019.

JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika) Journal homepage: <u>https://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/jipi</u>

ISSN: 2540-8984 Vol. 9, No. 2, Juni 2024, Pp. 615-627



- [17] B. Noranita, D. M. K. Nugraheni, M. I. Fitriyani, and Y. Nurhayati, "Business architecture and information system architecture design in savings and payment unit Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Diponegoro University using TOGAF 9 framework," in Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing Ltd, Jul. 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1943/1/012105.
- [18] Z. Rifai, T. Bratakusuma, and R. Arvianti, "Perencanaan Arsitektur Enterprise Desa Dengan Kerangka Kerja TOGAF ADM," *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, vol. 9, no. 2, pp. 177–184, Jun. 2020, doi: 10.32736/sisfokom.v9i2.803.
- [19] J.- Leonidas and J. F. Andry, "PERANCANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PADA PT.GADINGPUTRA SAMUDRA MENGGUNAKAN FRAMEWORK TOGAF ADM," *Jurnal Teknoinfo*, vol. 14, no. 2, p. 71, Jul. 2020, doi: 10.33365/jti.v14i2.642.
- [20] B. M. Ridwan, R. A. Ritonga, and A. Megayanti, "PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PADA PENYEMPURNAAN APLIKASI SITMAPAS RUMAH SAKIT KRAKATAU MEDIKA DENGAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM," Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika), vol. 5, 2022.
- [21] R. A. Hermawan and I. D. Sumitra, "Designing Enterprise Architecture Using TOGAF Architecture Development Method," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics Publishing, Nov. 2019. doi: 10.1088/1757-899X/662/4/042021.